

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI DI PEDESAAN

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkuat kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di suatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang

dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Kondisi ini sangat memberikan peluang pengembangan koperasi sebagai mitra kerja bagi usaha kecil dan menengah di daerah.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Keuntungan dengan diberlakukannya otonomi daerah bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah, antara lain: *Pertama*, bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak lagi berurusan dengan birokrasi di pusat. Ini merupakan salah satu dampak positif otonomi daerah untuk peningkatan efisiensi usaha di daerah. Begitu juga dapat menekan biaya pengurusan izin; *Kedua*, tataniaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tataniaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha daerah akan hilang, yang selanjutnya akan meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha daerah; bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hilangnya distorsi tersebut; *Ketiga*, mengurangi persaingan dengan perusahaan dengan lobi pusat. Ini artinya pengusaha-pengusaha daerah dapat bersaing di pasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pemerintah pusat), dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Dalam hal ini tantangan bagi pengusaha daerah adalah, bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka, paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah, agar *competition capability* antara pengusaha daerah dan pengusaha dari luar daerah sama; *Keempat*, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus

dengan kontraktor. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat atau pengusaha dari pusat (Jakarta); dan *kelima*, kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Untuk melakukan kegiatan bisnis dan mengembangkan skala usaha di daerah bagi pelaku bisnis daerah sangat ditentukan juga oleh dua hal, yaitu: kemampuan berproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produknya secara relatif terhadap produk-produk serupa dari pesaingnya. Prasarat ini berlaku tidak hanya bagi pengusaha yang melayani pasar nasional atau yang melakukan ekspor, tetapi juga bagi mereka yang melayani pasar lokal. Jadi, tantangan yang pasti akan dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah baik dalam perdagangan antar daerah maupun dalam era perdagangan bebas. Strategi yang harus ditempuh adalah bagaimana pelaku bisnis daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap untuk menghadapi masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dari pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi; dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha.

4.1. Profil Koperasi di Pedesaan

Berdasarkan informasi dan data yang ada pada Dinas Koperasi Propinsi Riau, rata-rata umur koperasi sekitar 10,2 tahun dengan rentangan 5,21 tahun sampai 16,4 tahun. Apabila dibandingkan dengan perusahaan bisnis lainnya, maka koperasi di Propinsi Riau cukup matang dalam perkembangannya dan tentu akan memperlihatkan dampak terhadap kesejahteraan anggotanya.

Secara sinergi kemajuan koperasi itu seharusnya sudah memperlihatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan sebagian besar koperasi itu berada di daerah pedesaan, khususnya di daerah-daerah sentra produksi pertanian.

Pada Tabel 4.1 disajikan penyebaran koperasi di Propinsi Riau berdasarkan kabupaten/kota. Jumlah koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 4.176 unit. Dari semua itu hanya sebanyak 2.791 unit yang aktif atau sebanyak 66,83%, sisanya sebanyak 33,17% kopersai yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen koperasi di pedesaan sehingga koperasi tersebut tidak mampu memberikan pelayanan kepada anggota. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi terutama di daerah pedesaan. Faktor lain disebabkan koperasi belum mampu menjadikan dirinya sebagai badan usaha yang mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Seharusnya koperasi di pedesaan mampu sebagai badan usaha ekonomi masyarakat terutama sebagai penampung hasil produksi di pedesaan dan sebagai pemasar (pengecer) kebutuhan masyarakat pedesaan. Apabila hal ini dapat dipenuhi oleh kopersai dan sistem menajemennya yang baik maka koperasi akan dibesarkan oleh masyarakat itu sendiri (anggotanya).

Apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi di Riau tercatat sebanyak 687.701 orang, artinya rata-rata masing-masing koperasi mempunyai anggota sebanyak 165 orang. Jumlah anggota ini apabila dibina akan dapat menghidupkan koperasi dengan baik di pedesaan. Ini merupakan potensi pasar yang cukup bagus terutama untuk komoditas barang harian (sembako) di pedesaan. Dari sisi lain produksi yang dihasilkan oleh masyarakat juga dipasarkan melalui koperasi. Tentu saja koperasi harus dipimpin oleh seorang manajer yang mengerti terhadap kebutuhan anggotanya.

Dari sisi modal koperasi memiliki Rp 380.017 juta (33,43%) dari total modal yang dimiliki. Namun dapat menghasilkan volume usaha sebanyak Rp 1.376.817 juta pada tahun 2008 dan menghasilkan sisa usaha sebesar Rp 111.582 juta.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Tahun 2008

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi			Keterlibatan Masyarakat			Modal Kerja		Volume Usaha	SHU
		Aktif	Tidak Aktif	Jum- lah	Ang- gota	Manajer	Karya- wan	Modal Sendiri	Modal Luar		
1	Pelalawan	134	40	174	34.899	32	281	15.124	29.055	132.621	4.408
2	Indragiri Hilir	202	302	504	63.382	85	331	53.924	35.335	105.099	5.445
3	Kampar	243	42	285	80.970	48	415	48.101	113.928	164.300	3.835
4	Rokan Hilir	185	183	368	35.885	54	76	31.826	62.345	42.475	2.280
5	Siak	169	54	223	38.980	30	562	32.739	60.234	170.591	41.381
6	Bengkalis	609	157	766	42.389	107	832	14.945	29.890	57.421	12.641
7	Pekanbaru	601	213	814	202.040	50	928	137.779	251.415	547.603	22.916
8	Kuantan Singingi	141	63	204	65.151	44	628	7.221	5.314	44.620	3.304
9	Dumai	189	172	361	22.821	64	871	13.197	5.721	44.888	6.821
10	Indragiri Hulu	218	65	283	46.664	58	258	10.063	130.000	27.685	4.686
11	Rokan Hulu	100	94	194	54.520	20	435	15.098	33.509	39.514	3.865
	Jumlah	2.791	1.385	4.176	687.701	592	5.617	380.017	756.746	1.376.817	111.582

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau (2008)



4.2. Permasalahan Koperasi di Pedesaan

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan permasalahan pengembangan koperasi, antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; 2) koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif; 3) masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya (koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus semata; 5) masih rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 6) koperasi masih sebatas penghubung antara anggota dengan mitra kerja (khusus untuk koperasi petani perkebunan kelapa sawit); dan 7) adanya kegiatan koperasi yang memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi).

Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara lain: 1) budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 2) pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 3) anggota koperasi di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 3) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 4) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 5) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produk lainnya masih relatif sempit; 6) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.

4.3. Kebijakan Wilayah dalam Pengembangan Koperasi

4.3.1 Program Pembangunan Daerah Riau

Sistem perekonomian Indonesia secara umum dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 yang memberi penekanan pada pengembangan dan berlakunya sistem ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan dilakukan melalui koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah Daerah Riau melakukan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini terwujud dalam Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten yang dirumuskan melalui visi, yaitu: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, pembangunan pendidikan yang menjamin kehidupan masyarakat agamis dan kemudahan aksesibilitas, dan pengembangan kebudayaan yang menempatkan kebudayaan melayu secara proporsional dalam kerangka pemberdayaan.

Pembangunan ekonomi di Daerah Riau dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat, martabat masyarakat Daerah Riau sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Riau 2020 yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni program pengetasan kemiskinan, pengetasan kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal program K2i):

1. Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan)

Program pengetasan kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi, oleh karena sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi namun memberikan konsekwensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dalam kehidupannya kurang bermarwah.

Melalui instrumen kebijakan ekonomi secara makro maupun mikro yang ditujukan pada pemberantasan kemiskinan masyarakat Riau, secara indikatif akan dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari

22,19 persen pada tahun 2004 turun menjadi sekitar 12,79 persen pada tahun 2008 (Dinaas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007).

Secara ekonomi faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan adalah ketidakadilan pelaksanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota. Dari satu sisi daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dan tumbuhnya sektor industri dan jasa, dari sisi lain daerah yang miskin hanya mengandalkan dari sektor pertanian yang hanya memberikan kontribusi yang relatif rendah dan lambat. Hal ini sangat menyolok antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Begitu juga penyelenggaraan otonomi daerah yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tempatan. Permasalahan demikian juga dipengaruhi pula oleh kepemilikan aset produktif yang tidak merata dan sangat tidak adil.

Khusus untuk daerah pedesaan pemilikan aset produktif seperti lahan sangat tidak adil, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dari hasil pengamatan terlihat penguasaan aset produktif (lahan) di pedesaan lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan orang kota. Dampak dari semuanya ini terhadap mekanisme pasar yang dipengaruhi secara signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Masyarakat lebih banyak berhadapan dengan pasar yang bersifat monopsoni.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengentasan Kebodohan);

Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM sangat menentukan perubahan dan percepatan pembangunan disuatu daerah. Apabila kualitas SDM rendah, maka masyarakat akan sulit menerima perubahan, mereka tidak mampu untuk mengikuti perubahan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kemajuan ekonomi. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan penguasaan teknologi. Individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan.

Pada masa 5 tahun mendatang Pemerintah Daerah Riau memprioritaskan dan mengedepankan berbagai kebijakan bidang pendidikan yang dapat menjamin terwujudnya kemudahan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan (terutama jenjang pendidikan dasar dan lanjutan). Usaha ini ditargetkan kepada segenap lapisan dan golongan masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat miskin dan suku terkebelakang dalam suasana agamis.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitasnya yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan dapat mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar wilayah kabupaten/kota, serta antara perdesaan dengan perkotaan. Semuanya ini akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat dan daerah Riau karena eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

4.3.2. Program Pembangunan Koperasi dan UKM

Sejalan dengan Program K2i Daerah Riau, maka Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau memacu pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan UKM dengan menetapkan visinya: Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama dalam sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Guna mewujudkan visi tersebut maka Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau memacunya melalui misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan professional.
2. Mengembangkan sistem Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berdaya saing melalui peningkatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia, perkuatan kelembagaan, struktur pernodalan, pengembangan teknologi dan jaringan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (kemitraan).

Tujuan yang hendak dicapai pada pengembangan koperasi dan UKM di daerah Riau, antara lain adalah:

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha Koperasi dan UKM
2. Mengembangkan Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan
3. Meningkatkan akses pasar dan jaringan usaha Koperasi dan UKM (kemitraan)
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pembina Koperasi dan UKM

4.3.3. Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pemerintah Daerah Propinsi Riau telah menetapkan kebijakan ekonomi diarahkan pada upaya pembangunan ketahanan ekonomi rakyat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang tersebar luas di pedesaan terutama di wilayah DAS dan desa pantai melalui pengembangan industri berbasis agribisnis komoditas unggulan daerah. Disamping itu pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta usaha mikro lainnya, harus dikembangkan guna terwujudnya struktur perekonomian yang kuat dengan didukung oleh ekonomi rakyat yang tangguh.

Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan seperti di atas, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk (Dinas Koperasi Propinsi Riau, 2007):

- a. Memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/ partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan.
- b. Melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada petani dengan memakai standar skala ekonomi keluarga petani sejahtera (3 ha/KK) dengan pendapatan per kapita US\$ 2.000 pertahun. Untuk itu perlu realokasi dan redistribusi sumberdaya dan asset-asset produktif yang dikuasai secara berlebihan oleh kekuatan ekonomi besar dan/atau tanah negara, termasuk lahan tidur dan lahan HGU yang telah berakhir masa berlakunya kepada masyarakat.
- c. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan *forestry* (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di Riau untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan petani pedesaan dalam membangun sistem perekonomian daerah di satu kawasan yang mampu menciptakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan penghidupan yang layak serta pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.
- d. Mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Baik sesama usaha kecil maupun dengan usaha-usaha besar dan kuat yang telah berkembang dan memiliki akses dengan pasar global. Memberikan pinjaman modal dengan syarat mudah dan suku bunga yang rendah.
- e. Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah.
- f. Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang. Percepatan distribusi kebutuhan bahan pokok, hasil produksi dan faktor-faktor produksi. Pengembangan kawasan potensial,

kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, kawasan agropolitan, kawasan industri dan kawasan sentra perdagangan untuk dapat dijadikan sebagai kutub pertumbuhan ekonomi daerah yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya secara sinergis. Disamping itu pembangunan infrastruktur harus mampu memutus keterisolasian daerah dan pengembangan daerah tertinggal menjadi daerah baru yang potensial dan mempunyai prospektif.

- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan potensi pertanian dalam arti luas agar efisien dan berdaya saing tinggi. Sasarannya adalah pembangunan prasarana produksi yang berupa pengairan/irigasi, sarana untuk jaringan pemasaran produk ke terminal agribisnis, serta meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan penunjang lainnya seperti penyuluh dan pendamping lapangan, balai benih/pembibitan, koperasi, dan sebagainya.
- h. Mendorong upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan dari produk pertanian tersebut. Disamping bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan petani, juga dalam rangka mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah yang akan mengurangi terjadinya *negative out-flow asset* daerah dan *regional linkage*.
- i. Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi berbagai potensi sumber-sumber keuangan daerah serta memperjuangkan keadilan perimbangan keuangan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah dirubah.
- j. Mengembangkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara terkoordinasi dan berkelanjutan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memacu perkembangan perekonomian daerah.
- j. Memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan

masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan itu diperlukan pengembangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna mempermudah masyarakat untuk mengakses kemajuan teknologi secara cepat dan tepat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.3.4. Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk Koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2006 unit koperasi berjumlah 4008 unit dan pada tahun 2007 meningkat menjadi berjumlah 4176 unit. Dari jumlah koperasi tersebut yang dapat digolongkan aktif sebanyak 2.779 unit pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 2.791 unit koperasi. Kehidupan koperasi/ usaha kecil dan menengah diupayakan untuk terus dikembangkan oleh pemerintah pada masa mendatang melalui penguatan permodalan, pembenahan sistem manajemen, dan perluasan akses pasar.

Guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di masa datang, maka pemerintah Daerah Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, antara lain (Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007):

- Mengembangkan koperasi dan usaha kecil-menengah melalui pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah;

- ❑ Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dan efisien dalam bentuk koperasi dan UKM melalui perluasan wawasan pengetahuan, organisasi, manajemen usaha, dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota masyarakat sehingga dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada koperasi dan UKM.

4.4. Pemetaan Koperasi di Daerah Survei

Hasil pengamatan di lapangan, penyebaran koperasi di pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir tidak merata. Jumlah koperasi dari berbagai jenis koperasi sebanyak 210 buah. Koperasi yang dominan jenis simpan pinjam dan waserda sebanyak 92 buah, koperasi bergerak di sektor pertanian sebanyak 89 buah. Jenis koperasi simpan pinjam lebih banyak ditemui di pusat-pusat kecamatan dan ibukota pedesaan. Jenis koperasi pertanian pada umumnya ditemui di kawasan perkebunan yang telah dikelola oleh perusahaan besar seperti perkebunan kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya jumlah dan jenis koperasi disajikan pada Tabel 4.2, sedangkan penyebarannya berdasarkan kecamatan dan desa disajikan pada Lampiran 3.

Di daerah pedesaan terutama di kawasan perkebunan kelapa jarang sekali ditemukan koperasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketertarikan masyarakat terhadap koperasi tersebut. Dari sisi lain juga diperoleh informasi di lapangan bahwa inisiatif dari pemuka masyarakat maupun pihak pemerintah sangat kurang sekali untuk mengembangkan koperasi di pedesaan. Tidak berkembangnya koperasi di pedesaan terutama di wilayah pengembangan perkebunan kelapa lebih banyak disebabkan kuatnya pengaruh pedagang harian di pedesaan. Untuk ukuran desa ketersediaan barang harian (kebutuhan pokok) masyarakat sudah tersedia di kedai harian yang dimiliki oleh para pedagang-pedagang (merangkap sebagai toke) di desa tersebut. Peran toke dalam menjajakan dagangannya sangat besar karena toke juga sebagai pembeli hasil kebun (kelapa, kopra, pinang, kakao dan lainnya).

Di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (khususnya pengembangan komoditi kelapa) kebiasaan belanja di kedai (kedai adalah sebutan di pedesaan yang

menjual barang harian) dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat berbelanja tanpa pembayaran tunai, pembayaran dilakukan setelah terjadinya panen kelapa. Panen kelapa dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selama tenggang waktu ini (masa tunggu panen) petani terpaksa berbelanja di kedai sang toke dengan cara berutang. Pembayaran dilakukan setelah masa panen tiba. Adakalanya hasil panen tidak bisa menutupi hutang sang petani.

Dari pengamatan di lapangan ada yang sangat menarik yaitu apabila keluarga petani membutuhkan uang tunai seketika, si petani dapat meminjam ke toke di desa tersebut tanpa adanya anggunan. Sementara apabila dia meminjam ke pihak lembaga perkreditan harus dilakukan di ibukota kecamatan atau kabupaten dengan barang anggunan. Di pedesaan petani dengan mudah dapat mendapatkan pinjaman dari toke dengan waktu yang relatif pendek. Tentu saja sebagai jaminan bagi si toke adalah hasil penjualan kopra pada musim panen. Apabila nilai penjualan kopra lebih rendah dibandingkan dengan jumlah hutang si petani, maka pada kredit berikutnya akan dikurangi nilai pinjamannya.

Pada kondisi harga kopra anjlok, hal ini sangat memukul petani karena tidak dapat membayar hutang pada si toke. Dampak dari ini semua si toke mengambil kepemilikan pohon kelapa, sedangkan kebun masih dimiliki petani. Permasalahannya disini adalah kebun (lahan) masih dimiliki si petani, sedangkan pohon kelapa dimiliki oleh toke. hal tersebut berdampak pada saat panen si petani bukan memanen hasil kebunnya tetapi memanen hasil kebun si toke. Pemilik kebun hanya sebagai buruh tani dan mendapatkan upah. Jika harga kopra tetap bertahan pada level bawah sedangkan harga kebutuhan harian terus melonjak naik, maka berdampak terhadap beban hidup petani yakni hutang petani semakin besar pada si toke dan akhirnya kebun petani diambil alih oleh si toke. Praktek seperti ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan rentenir yang dikenal selama ini.

Guna mengatasi permasalahan petani di pedesaan, maka sangat diperlukan adanya koperasi di setiap desa atau setiap kawasan permukiman sebagai penyedia kebutuhan petani di pedesaan. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan untuk aktivitas pertanian. Koperasi harus mampu menyaingi pelayanan yang diberikan oleh tode-toke pedesaan.

Untuk itu perlu suatu kebijakan pemerintah untuk mengembangkan koperasi di pedesaan. Koperasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada anggotanya (khususnya petani) berupa pembelian secara tunai hasil pertanian, penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, penyediaan sarana produksi pertanian, dan alat mesin yang digunakan untuk berusahatani. Koperasi harus dipimpin oleh orang yang mengerti manajemen perkoperasian, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan.

Berdasarkan data koperasi yang ada di pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir, koperasi pertanian/perkebunan berkembang lebih baik di wilayah perkebunan kelapa sawit. Sementara di wilayah perkebunan kelapa tanpa ada koperasi sama sekali. Koperasi yang lain seperti koperasi perikanan, angkutan masing masing ada 4 buah, itupun terdapat di ibukota kabupaten dan kecamatan.

Pendirian koperasi di daerah pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir sangat dibutuhkan oleh petani. Terutama untuk jaminan pasar hasil pertanian seperti yang dirasakan oleh petani kelapa sawit. Kelemahan pasar komoditas kelapa selama ini lebih bersifat monopolistik. Harga ditentukan sepihak oleh sang toke. Si petani tidak punya kekuatan tawar menawar. Kalaupun ada keinginan si petani untuk menjual ke toke lain, hal ini sulit terjadi kerana antara sang toke telah mempunyai perjanjian tidak tertulis, yaitu toke lain tidak boleh membeli hasil dari anak buah toke yang bersangkutan(anak buah merupakan sebutan bagi toke yang terikat hutang).

Tabel 4.2 Daftar dan Jenis Koperasi

No	Kecamatan
1	Kertajati
2	Kenung
3	Petah
4	Sungai Belang
5	Chok
6	Tengah Merah
7	Kuala Indragiri
8	Cincang
9	Tentilahan
10	Tembilahan Hulu
11	Tengkulung
12	Kempas
13	Selang Tuaka
14	Gaung Anak Serka
15	Gaung
16	Mandah
17	Kuamen
18	Pelintiran
19	Teluk Belangkon
20	Pulau Buntang

Kabupaten Indragiri Hilir
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir



Tabel 4.2 Jumlah dan Jenis Koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Simpan-Pinjam, Waserda	Pertanian, Perkebunan	Perdagangan	Peter-nakan	Peri-kanan	Ang-kutan	Lainnya	Jumlah
1	Keritang	13	4	11	5				1	21
2	Kemuning	11	-	5						5
3	Reteh	10	2	4			1			7
4	Sungai Batang	6	-	3			1			4
5	Enok	12	3	5		1				9
6	Tanah Merah	10	3	4			1	1	1	10
7	Kuala Indragiri	8	3	1						4
8	Concong	6	2	2						4
9	Tembilahan	6	50	7	1		1	3	1	63
10	Tembilahan Hulu	4	7	4						11
11	Tempuling	7	4	4						8
12	Kempas	8	3	11						14
13	Batang Tuaka	11	1	5						6
14	Gaung Anak Serka	8	3	2						5
15	Gaung	11	4	5	1				1	11
16	Mandah	12	1	5					1	7
17	Kateman	8	2		1					3
18	Pelangiran	14	-	3	2					5
19	Teluk Belengkong	13	-	4	2					6
20	Pulau Burung	15	-	4	3					7
Kabupaten Indragiri Hilir		193	92	89	15	1	4	4	5	210

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri hilir, tahun 2009